



KEPATUHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PERILAKU: PENGARUH ALTRUISME DAN STATUS MELALUI EKSPERIMEN LABORATORIUM

Joko Sustiyo

Politeknik Keuangan Negara STAN

Putri Permatasila

Kementerian Keuangan

Alamat Korespondensi: jokosustiyo@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[02 06 2025]

Dinyatakan Diterima
[05 11 2025]

KATA KUNCI:
Kepatuhan Pajak, Altruisme, Status,
Ekonomi Perilaku, Eksperimen
Laboratorium

KLASIFIKASI JEL:
H2 Taxation, Subsidies, and
Revenue

ABSTRAK

Tax compliance remains a crucial issue for developing countries, partly because tax revenue ratios are still far behind the global average in Indonesia. While economic factors affecting tax compliance have been widely studied, the influence of non-economic factors, particularly altruism and status, has been rarely explored in the Indonesian context. This study examines the influence of altruism and its status on tax compliance behaviour using a laboratory experiment involving 42 participants, including tax officials, non-tax civil servants, and students. The experiment was designed in five stages that simulated real financial decision-making and applied self-assessment and random audit mechanisms. Altruism was operationalised through voluntary donation opportunities, while status was categorised based on professional background. Data analysis used two-way ANOVA and binary logistic regression to assess the influence and interaction of independent variables on tax compliance. The results showed that both altruism and status significantly influenced tax compliance. Interestingly, individuals with altruistic tendencies are less likely to comply with tax obligations, suggesting a possible substitution effect between voluntary giving and tax obligations. Tax employees also demonstrated higher compliance levels than non-tax employees and students. No significant interaction between altruism and status was found. The results emphasise the important role of behavioural factors in formulating tax policies. This study also contributes to the limited literature on experimental tax compliance in Indonesia and provides empirical evidence to support tax policy

Kepatuhan pajak menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, sebagian karena rasio penerimaan pajak di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata global, termasuk Indonesia. Meskipun faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kepatuhan pajak telah banyak diteliti, pengaruh faktor non-ekonomi, khususnya altruisme dan status, jarang dieksplorasi dalam konteks Indonesia. Studi ini menganalisis pengaruh altruisme dan status terhadap perilaku kepatuhan pajak menggunakan eksperimen laboratorium yang melibatkan 42 peserta, termasuk pejabat pajak, pegawai negeri sipil non-pajak, dan mahasiswa. Eksperimen dirancang dalam lima tahap yang menyimulasikan pengambilan keputusan keuangan nyata dan menerapkan mekanisme penilaian diri dan audit acak. Altruisme dioperasionalkan melalui kesempatan donasi sukarela, sementara status dikategorikan berdasarkan latar belakang profesional. Analisis data menggunakan ANOVA dua arah dan regresi logistik biner untuk menilai pengaruh dan interaksi variabel independen terhadap kepatuhan pajak. Hasil menunjukkan bahwa baik altruisme maupun status secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Menariknya, individu dengan kecenderungan altruisme cenderung kurang patuh terhadap kewajiban pajak, menunjukkan adanya kemungkinan efek substitusi antara pemberian sukarela dan kewajiban pajak. Pegawai pajak juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan pegawai non-pajak dan mahasiswa. Tidak ditemukan interaksi signifikan antara altruisme dan status. Hasil ini menekankan peran penting faktor perilaku dalam merumuskan kebijakan pajak. Studi ini juga berkontribusi pada literatur yang terbatas tentang kepatuhan pajak eksperimental di Indonesia dan menyediakan bukti empiris untuk mendukung kebijakan pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fundamental dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, mendukung pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Cullen, 2013; Vatavu et al., 2019). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peran pajak menjadi semakin strategis mengingat keterbatasan sumber pendapatan lain dan tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan (Nair & Utama, 2023; Tanzi & Zee, 2000). Namun demikian, realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih jauh dari potensi optimalnya. Rasio penerimaan pajak Indonesia hanya mencapai 10,08% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024, yang menurun dari tahun 2023 sebesar 10,31% (DJP, 2025). Rendahnya rasio pajak ini menandakan adanya permasalahan struktural dalam sistem perpajakan nasional, salah satunya adalah tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah (Alm et al., 1990; Kaplanoglou & Rapanos, 2013).

Kepatuhan pajak, yang didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (OECD, 2004; James & Alley, 2002), merupakan faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan negara. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah tidak hanya berdampak pada minimnya penerimaan negara, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan fiskal dan menurunkan legitimasi sistem perpajakan di mata masyarakat (e Hassan et al., 2021; Trivedi et al., 2003). Oleh karena itu, memahami determinan kepatuhan pajak menjadi agenda penting bagi para pembuat kebijakan dan peneliti di bidang perpajakan.

Selama beberapa dekade, studi mengenai kepatuhan pajak didominasi oleh pendekatan ekonomi konvensional yang menekankan pada peran insentif ekonomi, probabilitas audit, dan besaran sanksi sebagai faktor utama yang memengaruhi perilaku wajib pajak (Allingham & Sandmo, 1972; Yitzhaki, 1974). Model ini berasumsi bahwa wajib pajak adalah agen rasional yang akan membandingkan manfaat dari penghindaran pajak dengan risiko dan konsekuensi hukuman yang mungkin diterima jika ketahuan. Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak sepenuhnya mampu menjelaskan variasi perilaku kepatuhan pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun risiko audit dan sanksi telah ditingkatkan, tingkat kepatuhan pajak tidak selalu mengalami peningkatan yang signifikan (Ramirez-Zamudo et al., 2021; Hashimzade et al., 2013).

Keterbatasan pendekatan ekonomi konvensional tersebut mendorong berkembangnya paradigma baru dalam studi kepatuhan pajak, yaitu pendekatan ekonomi perilaku (*behavioral economics*). Pendekatan ini mengintegrasikan faktor-faktor psikologis, sosial, dan nonekonomi dalam analisis perilaku wajib pajak (Alm, 2012; Torgler, 2007). Dalam kerangka ekonomi perilaku, individu tidak selalu bertindak secara rasional semata, melainkan juga dipengaruhi oleh norma sosial, nilai-nilai budaya, persepsi keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta motivasi intrinsik seperti moralitas dan altruisme. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat berperan signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak, bahkan dalam beberapa kasus lebih dominan dibandingkan faktor ekonomi (Alm & Torgler, 2006; Kirchler et al., 2008).

Salah satu faktor nonekonomi yang mulai mendapat perhatian dalam literatur kepatuhan pajak adalah altruisme, yaitu kecenderungan individu untuk bertindak demi kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung (Keer et al., 2004; Myers, 2009). Dalam konteks perpajakan, altruisme dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap pajak sebagai bentuk kontribusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun, hubungan antara altruisme dan kepatuhan pajak tidak selalu linear. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat altruisme tinggi dapat saja memilih untuk menyalurkan kontribusinya melalui jalur non-pajak, seperti donasi atau sumbangan langsung, sehingga justru menurunkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak formal (Frey & Torgler, 2007).

Selain altruisme, status sosial dan profesional juga diduga berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Status dapat memengaruhi persepsi individu terhadap norma sosial, ekspektasi masyarakat, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Pegawai pajak, pegawai negeri non-pajak, dan mahasiswa, misalnya, memiliki latar belakang, pengalaman, dan ekspektasi yang berbeda dalam memandang kewajiban perpajakan. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik (Torgler & Schaltegger, 2005).

Meskipun demikian, kajian empiris mengenai pengaruh altruisme dan status terhadap kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat terbatas. Altruisme, yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, dapat mempengaruhi cara individu memandang kewajiban pajak mereka. Memahami pengaruh ini dapat membantu pembuatan kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepatuhan pajak. Penelitian ini juga penting untuk mengembangkan kebijakan yang mempertimbangkan motivasi intrinsik, bukan hanya mengandalkan sanksi atau insentif finansial. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor ekonomi dan belum secara spesifik menguji peran faktor-faktor psikologis dan sosial dalam konteks perilaku kepatuhan pajak (e Hassan et al., 2021; Kirchler et al., 2014; Mebratu, 2024). Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan metode survei yang memiliki keterbatasan dalam mengungkap perilaku nyata wajib pajak, seperti bias sosial dan keterbatasan memori responden (Torgler, 2007a; Supriyadi, 2017). Penelitian lain yang menggunakan eksperimen di Indonesia telah dilakukan oleh Dong et al. (2025) yang mempelajari kepatuhan pajak pada sekitar 12.000 UMKM melalui intervensi perilaku berupa pengiriman salah satu dari tiga jenis surat cetak (pencegahan, informasi, atau barang publik) atau tanpa surat (kelompok kontrol). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang mampu menangkap perilaku aktual wajib pajak dalam situasi yang lebih terkontrol, salah satunya melalui eksperimen laboratorium.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur dengan menganalisis pengaruh altruisme dan status terhadap kepatuhan pajak melalui pendekatan eksperimen laboratorium. Dengan melibatkan partisipan dari berbagai latar belakang profesi, yaitu pegawai pajak, pegawai negeri non-pajak, dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan perilaku kepatuhan pajak di Indonesia. Temuan dari penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi perilaku di bidang perpajakan, tetapi juga memberikan implikasi kebijakan yang relevan bagi otoritas perpajakan dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif dan berbasis perilaku.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Kepatuhan Pajak: Perspektif Teori Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Perilaku

Kepatuhan pajak merupakan salah satu isu sentral dalam sistem perpajakan modern dan menjadi perhatian utama bagi pemerintah di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (OECD, 2004; James & Alley, 2002). Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi sangat penting untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara, mendukung pembangunan nasional, serta menjaga legitimasi sistem perpajakan.

Secara teoritis, studi mengenai kepatuhan pajak telah berkembang dari pendekatan ekonomi konvensional menuju pendekatan ekonomi perilaku. Model ekonomi konvensional, yang dipelopori oleh Allingham dan Sandmo (1972), memandang wajib pajak sebagai agen rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi antara manfaat penghindaran pajak dan risiko terkena sanksi akibat audit. Dalam model ini, probabilitas audit dan besaran sanksi menjadi instrumen utama yang diyakini dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Yitzhaki, 1974). Namun, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan audit dan sanksi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan pajak (Hashimzade et al., 2013; Ramirez-Zamudo et al., 2021). Hal ini menandakan adanya faktor-faktor lain di luar aspek ekonomi yang turut memengaruhi perilaku wajib pajak.

Keterbatasan model ekonomi konvensional mendorong berkembangnya pendekatan ekonomi perilaku (*behavioral economics*) dalam studi kepatuhan pajak. Pendekatan ini mengakui bahwa perilaku manusia tidak selalu rasional dan seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya (Alm, 2012; Torgler, 2007). Dalam kerangka ekonomi perilaku, individu dipandang sebagai makhluk sosial yang keputusan-keputusannya dipengaruhi oleh norma sosial, moralitas, kepercayaan terhadap pemerintah, serta motivasi intrinsik seperti rasa keadilan dan altruisme. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa faktor-faktor nonekonomi ini dapat berperan signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak, bahkan dalam beberapa kasus lebih dominan dibandingkan faktor ekonomi (Alm & Torgler, 2006; Kirchler et al., 2008).

2.1.2. Altruisme sebagai Determinan Kepatuhan Pajak

Altruisme merupakan salah satu faktor nonekonomi yang mulai banyak mendapat perhatian dalam literatur kepatuhan pajak. Altruisme didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak demi kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung (Keer et al., 2004; Myers, 2009). Dalam konteks perpajakan, individu yang memiliki sifat altruistik dapat memandang pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak, dalam hal ini, tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial dan keadilan distributif.

Namun demikian, hubungan antara altruisme dan kepatuhan pajak tidak selalu bersifat linear. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat altruisme tinggi dapat memilih menyalurkan kontribusi sosialnya melalui jalur non-pajak, seperti donasi atau sumbangan langsung, sehingga justru menurunkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak formal (Frey & Torgler, 2007). Hal ini dikenal sebagai efek substitusi antara kontribusi sukarela dan kewajiban pajak. Studi lain juga menemukan bahwa persepsi terhadap efektivitas penggunaan pajak oleh pemerintah dapat memoderasi pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak (Torgler, 2007). Jika individu merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak digunakan secara efektif untuk kepentingan publik, maka kecenderungan untuk patuh dapat menurun, meskipun individu tersebut memiliki sifat altruistik yang tinggi.

2.1.3. Status Sosial dan Profesional

Status sosial dan profesional juga diyakini berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak (Kasper, 2016). Status dapat memengaruhi persepsi individu terhadap norma sosial, ekspektasi masyarakat, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah (Hasty & Maner, 2020; Tankard & Paluck, 2016). Dalam konteks penelitian ini, status dikategorikan berdasarkan latar belakang profesi, yaitu pegawai pajak, pegawai negeri non-pajak, dan mahasiswa. Setiap kelompok memiliki karakteristik, pengalaman, dan ekspektasi yang berbeda dalam memandang kewajiban perpajakan.

Sebagai contoh, pegawai pajak diasumsikan memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang lebih tinggi serta keterikatan moral yang lebih kuat terhadap sistem perpajakan dibandingkan kelompok lain. Studi Torgler & Schaltegger (2005) menunjukkan bahwa kelompok dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik. Sementara itu, mahasiswa sebagai kelompok yang relatif muda dan belum memiliki pengalaman langsung sebagai wajib pajak, mungkin memiliki tingkat

kepatuhan yang lebih rendah. Status sosial juga dapat memengaruhi persepsi individu terhadap risiko sanksi sosial dan reputasi, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku kepatuhan pajak (Alm & Torgler, 2006).

2.1.4. Interaksi antara Altruisme dan Status dalam Kepatuhan Pajak

Selain pengaruh langsung, interaksi antara altruisme dan status juga penting untuk dianalisis. Kemungkinan terdapat efek moderasi, di mana pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak dapat berbeda tergantung pada status sosial atau profesional individu. Misalnya, pegawai pajak dengan tingkat altruisme tinggi mungkin tetap menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi karena adanya tekanan profesional dan norma institusional, sementara pada kelompok mahasiswa, pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak bisa jadi lebih lemah atau bahkan negatif.

2.2. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis penelitian ini dikembangkan sebagai berikut:

2.2.1. Pengaruh Altruisme terhadap Kepatuhan Pajak

H0a: Altruisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H1a: Altruisme berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa individu dengan tingkat altruisme tinggi dapat memiliki kecenderungan untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajak, tergantung pada persepsi mereka terhadap efektivitas penggunaan pajak dan preferensi kontribusi sosial. Individu dengan tingkat altruisme tinggi cenderung mematuhi kewajiban pajak karena altruisme mendorong mereka untuk mempertimbangkan kesejahteraan orang lain dan manfaat sosial dari pajak (Syarbin et al., 2023). Namun, kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang efektivitas penggunaan pajak (apabila mereka percaya bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik, mereka lebih cenderung untuk patuh, dan sebaliknya) (Bobek et al., 2025; Syarbin et al., 2023).

2.2.2. Pengaruh Status terhadap Kepatuhan Pajak

H0b: Status tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

H1b: Status berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hipotesis ini didasarkan pada literatur yang menunjukkan bahwa status sosial dan profesional dapat memengaruhi tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keterikatan moral terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku kepatuhan pajak.

2.2.3. Interaksi antara Altruisme dan Status terhadap Kepatuhan Pajak

H0c: Status tidak memoderasi pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak

H1c: Status memoderasi pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis ini didasarkan pada kemungkinan bahwa pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak dapat berbeda pada setiap kelompok status, tergantung pada norma sosial, tekanan profesional, dan ekspektasi institusional yang berlaku pada masing-masing kelompok.

2.3. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model ANOVA dua arah dengan interaksi, di mana variabel independen terdiri dari altruisme (dua taraf: sumbangan dan tidak sumbangan) dan status (tiga taraf: pegawai pajak, pegawai non-pajak, dan mahasiswa), serta variabel dependen adalah kepatuhan pajak. Model ini memungkinkan analisis pengaruh utama masing-masing variabel independen serta interaksi di antara keduanya terhadap kepatuhan pajak.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Eksperimental

Rancangan eksperimen meliputi dua bagian. Bagian pertama merupakan eksperimen utama dalam penelitian ini, yaitu pengujian terhadap kepatuhan pajak. Bagian kedua terdiri dari lembar observasi yang mengukur kepribadian responden. Pada setiap bagian, responden akan membuat keputusan finansial menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran.

a. Bagian pertama menguji kepatuhan pajak melalui 5 tahapan eksperimen. Lima tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Tahap 1 adalah pengusahaan untuk mendapatkan penghasilan.

Peserta eksperimen melakukan sebuah pekerjaan tertentu untuk menghasilkan uang secara nyata. Tugas tersebut membutuhkan usaha berdasarkan tingkat keterampilan peserta. Hal ini bertujuan agar peserta merasa memiliki pendapatan tersebut sehingga mereka akan mempertimbangkan perilaku ketika akan mengeluarkan uang (Gill & Prowse, 2012). Peserta melemparkan bola kecil ke arah ember sebanyak 10 kali. Peserta akan mendapatkan Rp1.000,00 untuk setiap bola yang masuk ke dalam ember sehingga total uang yang didapatkan apabila peserta memasukkan seluruh bola adalah Rp10.000,00 (10 bola x Rp1.000,00). Percobaan tersebut dilakukan selama 10 kali. Total maksimal uang yang didapatkan peserta adalah Rp100.000,00 (10 periode x Rp10.000,00).

Penelitian ini menggunakan lemparan bola karena memiliki beberapa kelebihan dari metode lain (Gill & Prowse, 2012). Alasan pertama adalah prosedur tugas tersebut mudah dipahami dan tidak menguji pengetahuan peserta.

Kedua, tugas tersebut mengukur kinerja peserta sesuai upaya mereka sendiri dan tidak tergantung kinerja individu lain. Yang terakhir, peserta tidak memiliki kesempatan untuk menebak agar mendapatkan poin, tidak seperti penghitungan numerik dan pengujian pengetahuan umum.

Tahap pelemparan bola sebanyak 10 percobaan. Tujuan pengulangan tersebut adalah keakraban peserta pada prosedur eksperimental melalui proses pembelajaran sehingga mereka dapat beradaptasi dan berperilaku sesuai karakteristik asli. Selain itu, hal ini untuk mendapatkan data dari peserta yang mencukupi dan durasi waktu yang tidak melebihi 2 jam. Durasi menjadi hal yang perlu diperhatikan karena terkait dengan insentif yang diberikan kepada peserta dan tingkat kelelahan yang akan mempengaruhi kualitas data (Fonseca & Myles, 2012). Oleh karena itu, pengamatan dapat menangkap perilaku substansial yang variatif dan heterogenitas dapat dikontrol. Dengan demikian, inferensi statistik dapat dilakukan.

2) Tahap 2 adalah pengungkapan pajak penghasilan.

Penghasilan yang dikumpulkan peserta dari tahap 1 dikenakan pajak dengan dihitung oleh mereka sendiri (*self-assessment*). Hasil penghitungan dari peserta direkapitulasi dan menjadi *database* pengamatan. Hal ini dilakukan setelah tahap 2 dan diulang sebanyak 10 kali.

3) Tahap 3 adalah audit pada peserta.

Setelah tahap 2 selesai, peserta diaudit secara acak sehingga peluang diaudit adalah sejumlah probabilitas tertentu. Hasil audit akan menjadi dasar dari perlakuan kepada peserta yang diaudit. Apabila peserta mengungkapkan penghasilan kena pajak dan pajak yang dibayarkan telah sesuai, mereka akan bebas hukuman. Sebaliknya, apabila pelaporan peserta tidak sesuai yang seharusnya, subjek akan dikenakan penalti sejumlah tertentu.

4) Tahap 4 adalah pembayaran kepada peserta.

Setelah audit, peserta mendapatkan hadiah sesuai penghitungan dari tahap 1 sampai dengan tahap 3.

5) Tahap 5 adalah penyampaian informasi.

Jumlah denda dan audit dikirim ke peserta sebagai informasi yang diketahui peserta.

b. Bagian 2: Beberapa perlakuan eksperimen

Beberapa perlakuan membentuk dasar percobaan. Hal ini dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut ini.

1) Bagaimana altruisme mempengaruhi kepatuhan?

Penelitian ini mempertimbangkan dua kondisi yang terkait dengan sifat altruisme. Kondisi pertama adalah peneliti menyatakan kepada peserta bahwa mereka boleh menyumbangkan sejumlah uang tertentu sebagai sumbangan sukarela di kotak sumbangan yang telah disediakan. Peneliti juga menyatakan bahwa sumbangan tersebut akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Besaran sumbangan diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak peserta. Sebaliknya, kondisi kedua menyatakan bahwa sumbangan bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak peserta.

2) Bagaimana status mempengaruhi kepatuhan?

Status merupakan status partisipan yang terdiri dari

- a) DJP : pegawai Direktorat Jenderal Pajak
- b) Non DJP : pegawai Kementerian Keuangan yang bukan pegawai DJP
- c) Mahasiswa : mahasiswa PKN STAN

3.2. Prosedur Eksperimental

Prosedur eksperimen berlangsung sebagai berikut. Sebelum tahap 1 dari percobaan dimulai, peserta akan membaca petunjuk cara pengerjaan tugas selama 10 menit. Peserta diperkenankan bertanya kepada peneliti apabila belum paham. Peneliti memastikan bahwa peserta memahami instruksi tahapan-tahapan dalam eksperimen bagian 1. Setelah peserta memahami prosedur, peneliti bertanya sekali lagi kepada peserta bahwa mereka telah memahami prosedur secara menyeluruh. Kemudian, eksperimen bagian 1 dan 2 akan dimulai mengikuti arahan peneliti.

Setiap peserta memperoleh imbalan atas pekerjaan tertentu tersebut (tahap 1 bagian 1) berupa uang rupiah riil. Hal ini dilakukan agar peserta merasa memiliki uang tersebut secara nyata. Keputusan finansial seperti membayar pajak diharapkan mempertimbangkan kepemilikan mereka atas uang tersebut.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan dari eksperimen laboratorium. Data didapatkan dari peserta eksperimen di kelas pada periode September-Oktober 2022. Penelitian ini memilih tiga kelompok partisipan untuk menyeimbangkan validitas internal dan eksternal. Pegawai DJP merepresentasikan praktisi yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan administrasi pajak sehingga menjadi acuan dengan status profesional tinggi dan pemahaman pajak yang kuat. Kelompok Kemenkeu non-DJP dipilih sebagai pembanding yang berada dalam kelembagaan Kemenkeu. Sementara itu, mahasiswa PKN STAN yang telah menempuh mata kuliah perpajakan sebagai representasi dari eksternal.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan pajak merupakan persentase dari jumlah peserta yang melaporkan pajaknya dengan benar dibagi jumlah pelaku eksperimen keseluruhan.

Variabel independen terdiri atas dua faktor, yaitu altruisme dan status. Altruisme terdiri dari 2 taraf, yaitu SUMBANGAN dan TIDAKSUMBANGAN. Sedangkan status terdiri dari 3 taraf, yaitu DJP, NON DJP, dan MAHASISWA.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang akan digunakan adalah hasil lembar observasi. Lembar ini diisi oleh peneliti saat mengamati eksperimen secara langsung.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui eksperimen laboratorium di ruangan tertentu. Setiap keputusan dan tindakan partisipan selama eksperimen dicatat secara sistematis oleh peneliti dan asisten penelitian. Untuk menjaga objektivitas, partisipan tidak diberitahu secara rinci mengenai tujuan akhir penelitian sebelum eksperimen selesai (*single-blind*). Jumlah sampel penelitian sebanyak 42 orang. Jumlah tersebut dianggap mencukupi untuk penelitian eksperimen (Roscoe, 1975).

3.7. Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif menunjukkan karakteristik variabel dependen dan independen yang terdiri dari nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif dilakukan untuk menjelaskan sampel secara umum.

Sementara itu, statistik inferensial dilakukan untuk pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan atau fenomena. Pada penelitian ini digunakan 2 analisis, yaitu pengujian ANOVA dua arah dan regresi logistik. Pengujian ANOVA dua arah dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan *mean* (rata-rata) tingkat kepatuhan pajak dilihat dari variabel altruisme dan variabel status. Pada uji ANOVA dua arah, terdapat dua uji analisis yang dilakukan, yaitu uji beda *mean* berdasar variabel independen yang berbeda (altruisme dan status) dan uji interaksi antar variabel independen. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian regresi logistik untuk melihat berapa besar pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Sebelum membentuk model regresi logistik, hal yang perlu dilakukan adalah menguji signifikansi parameter pada model regresi logistik biner (Agresti, 2003), yaitu:

1. Uji Rasio Likelihood

Uji ini dilakukan untuk membandingkan model apakah fit dengan data ataukah tidak. Hipotesis uji rasio sebagai berikut.

H_0 : model fit dengan data

H_1 : model tidak fit dengan data

Skor yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$G = -2 \ln \left(\frac{\text{likelihood tanpa variabel independen}}{\text{likelihood dengan variabel independen}} \right)$$

Nilai G adalah distribusi Chi-square yang memiliki derajat bebas p. Taraf nyata adalah α . Dengan demikian, H_0 ditolak jika $G \geq X^2_{(\alpha, p)}$. Apabila H_0 ditolak, model tidak fit dengan data.

2. Uji Wald

Uji Wald untuk mengetahui pengaruh setiap prediktor terhadap variabel respons. Hipotesis uji Wald sebagai berikut.

H_0 : $\beta_i = 0$ dengan $i = 1, 2, 3, \dots, p$

H_1 : $\beta_i \neq 0$ dengan $i = 1, 2, 3, \dots, p$

Skor yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$W = \left[\frac{\beta_i}{SE(\beta_i)} \right]^2$$

Ukuran W adalah distribusi Chi-square yang derajat bebasnya 1. Nilai α adalah tingkat signifikansi. Dengan demikian, kriteria penilaian adalah H_0 ditolak apabila $W \geq X^2_{(\alpha, 1)}$.

3. Uji Goodness of fit test

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian persamaan regresi logistik biner yang telah disusun (Hosmer, Lemeshow, and Sturdivant, 2013) menggunakan *Hosmer-Lemeshow Test*. Hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H_0 : $X^2_{HL} = X^2_{(g-2)}$

H_1 : $X^2_{HL} \geq X^2_{(g-2)}$

Skor X^2_{HL} merupakan distribusi *chi-square Hosmer-Lemeshow* berdasarkan *output* SPSS yang akan dibandingkan dengan nilai $X^2_{(g-2)}$ (*chi-square* tabel). Kriteria penilaian adalah H_0 diterima jika $X^2_{HL} = X^2_{(g-2)}$.

Penelitian dilanjutkan dengan analisis regresi logistik biner setelah uji signifikansi dilakukan. Regresi logistik ini digunakan karena variabel respon bersifat dikotomis (Hosmer et.al, 2013b). Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas yang bersifat biner dengan variabel terikat yang bersifat kategoris (Pampel, 2000).

Kemudian, penelitian ini menggunakan model ANOVA dua arah dengan interaksi. Berdasarkan dua faktor dari variabel independen, akan didapatkan 6 kombinasi perlakuan (2×3).

Model penelitian digambarkan sebagai berikut.

$$Y_{ijkz} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijkz}$$

Dimana:

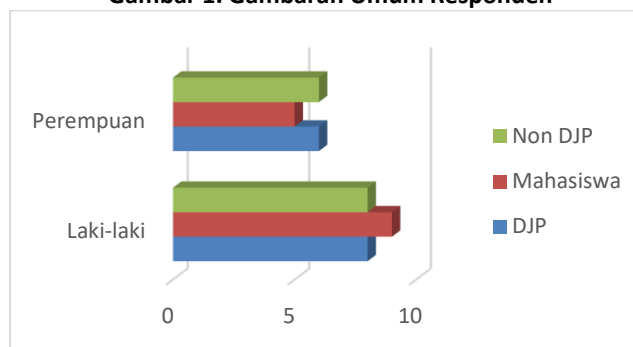
- Y_{ijz} = Kepatuhan pajak sebagai respon akibat kombinasi perlakuan altruisme ke-i dan status ke-j pada ulangan ke-z
 μ = Rata-rata Y secara umum tanpa memperhatikan 3 faktor
 α_i = Pengaruh altruism ke-i (i=1,2)
 β_j = Pengaruh status ke-j (j=1,2,3)
 $(\alpha\beta)_{ij}$ = Pengaruh interaksi antara altruism ke-i dan status ke-j
 ε_{ijkz} = Random error untuk kepatuhan pajak akibat kombinasi perlakuan altruisme ke-i, jejaring sosial ke-j, dan jenis kelamin ke-k pada ulangan ke-z

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Deskriptif

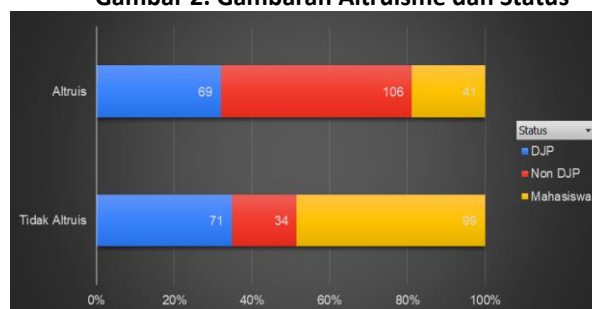
Penelitian ini melibatkan 42 partisipan yang terdiri dari tiga kelompok status, yaitu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pegawai negeri sipil (PNS) non-DJP, dan mahasiswa. Masing-masing kelompok terdiri dari 14 orang, dengan distribusi gender sebanyak 25 laki-laki dan 17 perempuan. Karakteristik demografis ini dipilih untuk memastikan keberagaman latar belakang partisipan, sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan variasi perilaku kepatuhan pajak di antara kelompok sosial dan profesional yang berbeda.

Gambar 1. Gambaran Umum Responden



Berdasarkan Gambar 2, analisis deskriptif awal menunjukkan adanya variasi tingkat altruisme dan kepatuhan pajak di antara kelompok partisipan. Kelompok PNS non-DJP tercatat memiliki tingkat altruisme tertinggi, diikuti oleh pegawai DJP, dan yang terendah adalah kelompok mahasiswa. Sementara itu, tingkat kepatuhan pajak juga menunjukkan pola yang serupa, di mana pegawai DJP cenderung memiliki tingkat kepatuhan tertinggi, diikuti oleh PNS non-DJP, dan mahasiswa sebagai kelompok dengan tingkat kepatuhan terendah. Temuan ini memberikan indikasi awal bahwa status sosial dan profesional serta kecenderungan altruisme dapat berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.

Gambar 2. Gambaran Altruisme dan Status



4.2. Analisis Inferensial

a. Uji ANOVA Dua Arah

Analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan ANOVA dua arah untuk menguji pengaruh utama (*main effect*) dan interaksi (*interaction effect*) antara variabel altruisme dan status terhadap tingkat kepatuhan pajak. Hasil uji ANOVA dua arah menunjukkan beberapa temuan penting:

1. Pengaruh Altruisme terhadap Kepatuhan Pajak:

Nilai signifikansi untuk variabel altruisme adalah 0,029 (< 0,05), yang mengindikasikan adanya perbedaan signifikan tingkat kepatuhan pajak antara partisipan yang memberikan sumbangan dan yang tidak. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa altruisme secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini mendukung literatur ekonomi perilaku yang menyoroti pentingnya motivasi intrinsik dalam perilaku kepatuhan pajak (Torgler, 2007; Alm, 2012).

2. Pengaruh Status terhadap Kepatuhan Pajak:

Nilai signifikansi untuk variabel status adalah 0,007 ($< 0,05$), yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan tingkat kepatuhan pajak di antara kelompok pegawai DJP, PNS non-DJP, dan mahasiswa. Dengan demikian, status sosial dan profesional terbukti secara empiris memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Temuan ini konsisten dengan teori *social identity* dan literatur sebelumnya yang menegaskan bahwa status profesional dapat membentuk norma dan ekspektasi perilaku tertentu, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak (Torgler & Schaltegger, 2005).

3. Interaksi antara Altruisme dan Status:

Nilai signifikansi interaksi antara altruisme dan status adalah 0,349 ($> 0,05$), yang berarti tidak terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak. Dengan kata lain, pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak bersifat konsisten di seluruh kelompok status, dan demikian pula sebaliknya.

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Kepatuhan_Pajak

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	.310 ^a	5	.062	2.720	.020
Intercept	333.930	1	333.930	14627.093	.000
Altruisme	.110	1	.110	4.800	.029
Status	.231	2	.116	5.060	.007
Altruisme * Status	.048	2	.024	1.056	.349
Error	9.451	414	.023		
Total	410.000	420			
Corrected Total	9.762	419			

a. R Squared = .032 (Adjusted R Squared = .020)

Kepatuhan_Pajak

Duncan^{a,b}

Status	N	Subset	
		1	2
Mahasiswa	140	.95	
PNS DJP	140		.99
PNS Non-DJP	140		.99
Sig.		1.000	.693

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .023.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 140.000.

b. Alpha = .05.

Uji post hoc (Duncan) lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak kelompok mahasiswa secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kedua kelompok pegawai (DJP dan non-DJP). Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman profesional dan paparan terhadap sistem perpajakan dapat meningkatkan kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban pajak.

b. Uji Regresi Logistik Biner

Untuk mengestimasi besaran pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan pajak, dilakukan analisis regresi logistik biner. Sebelum membangun model regresi, dilakukan beberapa uji signifikansi parameter untuk memastikan kelayakan model:

1. Uji Rasio Likelihood

Nilai -2 Log likelihood sebesar 87,376 lebih kecil dari nilai chi-square tabel (467,73), sehingga model dinyatakan fit dengan data. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibangun mampu menjelaskan variasi data secara memadai.

2. Uji Wald

Nilai Wald untuk altruisme adalah 2,811 (signifikan pada taraf 10%), sedangkan untuk status adalah 4,652 (signifikan pada taraf 5%). Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik secara individual maupun simultan.

3. Uji Goodness of Fit (Hosmer-Lemeshow)

Nilai chi-square Hosmer-Lemeshow sebesar 4,893 dengan signifikansi 0,298 ($> 0,05$), menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibangun sesuai dengan data observasi dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai prediksi model dengan data aktual.

Setelah uji signifikansi parameter terpenuhi, maka dapat dilanjutkan dengan membentuk model regresi logistik. Analisis regresi logistik biner digunakan untuk mengetahui apakah altruisme dan status wajib pajak mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kemudian, pengujian dilakukan pada masing-masing variabel bebas dan uji simultan untuk mengetahui peubah yang signifikan. Berikut hasil uji regresi logistik biner.

Tabel Hasil Regresi Logistik Biner

Variabel Independen	Variabel Dependen = Kepatuhan Pajak	
	Regresi Logistik	
	Koefisien	Odds Ratio
altruisme	-1,226*	0,293
status	-1,113**	0,329
Konstanta	6,987	
Pseudo R square	8,4%	
Jumlah sampel	420	

Keterangan: ** menunjukkan taraf signifikansi 5%.
* menunjukkan taraf signifikansi 10%

Interpretasi hasil regresi logistik menunjukkan bahwa:

1. **Altruisme** memiliki koefisien negatif dan *odds ratio* 0,293, yang berarti partisipan dengan sifat altruisme cenderung 0,293 kali lebih kecil kemungkinannya untuk patuh membayar pajak dibandingkan partisipan yang tidak altruistik. Dengan kata lain, semakin tinggi kecenderungan altruisme, semakin rendah tingkat kepatuhan pajak. Temuan ini mendukung hipotesis efek substitusi, di mana individu dengan preferensi tinggi untuk kontribusi sosial lebih memilih menyalurkan kontribusinya melalui jalur non-pajak (misalnya donasi langsung) daripada melalui pembayaran pajak formal (Frey & Torgler, 2007).
2. **Status juga** berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, dengan *odds ratio* 0,329. Artinya, semakin tinggi skor status (1 = pegawai DJP, 2 = PNS non-DJP, 3 = mahasiswa), maka kecenderungan untuk patuh membayar pajak semakin menurun. Pegawai DJP paling patuh, diikuti PNS non-DJP, dan mahasiswa paling tidak patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman profesional, pengetahuan perpajakan, dan keterikatan institusional berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak.

Model regresi logistik yang terbentuk adalah:

$$\ln(P/1-P) = 6,987 - 1,226 \text{ Altruisme} - 1,113 \text{ Status}$$

di mana P adalah probabilitas kepatuhan pajak.

Sebagai ilustrasi, probabilitas kepatuhan pajak untuk partisipan dengan sifat altruisme dan status sebagai pegawai DJP (altruisme = 1, status = 1) adalah 0,9905, sedangkan untuk partisipan dengan sifat altruisme dan status sebagai mahasiswa (altruisme = 1, status = 3) adalah 0,9185. Hal ini menunjukkan bahwa status sebagai pegawai DJP meningkatkan probabilitas kepatuhan pajak secara substansial dibandingkan dengan mahasiswa.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Altruisme dan Kepatuhan Pajak: Perspektif Teoretis dan Empiris

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa altruisme, yang secara konseptual didefinisikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak demi kepentingan orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung (Myers, 2009), justru berpengaruh negatif dengan kepatuhan pajak. Hasil ini memperkaya diskursus dalam literatur ekonomi perilaku, khususnya terkait dengan motif intrinsik dalam perilaku kepatuhan pajak. Secara teoretis, model-model awal kepatuhan pajak seperti Allingham dan Sandmo (1972) menekankan kalkulasi untung-rugi berbasis risiko audit dan sanksi. Namun, pendekatan ini telah dikritik karena gagal menjelaskan variasi empiris kepatuhan pajak di berbagai negara (Alm, 2019; Hashimzade et al., 2013).

Dalam kerangka ekonomi perilaku, motivasi intrinsik seperti altruisme dan *tax morale* menjadi determinan penting (Frey & Torgler, 2007; Torgler, 2007). Namun, hasil penelitian ini mendukung hipotesis efek substitusi, di mana individu dengan tingkat altruisme tinggi cenderung menyalurkan kontribusi sosialnya melalui jalur non-pajak, seperti donasi langsung, daripada melalui pembayaran pajak formal (Ramadhan et al., 2025). Fenomena ini telah didokumentasikan oleh Frey & Torgler (2007), yang menemukan bahwa *tax morale* dan *conditional cooperation* sangat dipengaruhi oleh persepsi efektivitas dan keadilan penggunaan pajak oleh pemerintah. Jika individu memandang sistem perpajakan tidak transparan atau tidak adil, mereka lebih memilih kontribusi sosial yang dapat mereka kontrol secara langsung.

Lebih lanjut, Torgler (2007) menegaskan bahwa persepsi terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan merupakan determinan utama *tax morale*. Dalam konteks Indonesia, di mana tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi efektivitas penggunaan pajak masih menjadi isu (OECD, 2017), efek substitusi ini menjadi semakin relevan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan empiris sebelumnya, tetapi juga menegaskan pentingnya dimensi psikologis dan institusional dalam perilaku kepatuhan pajak.

4.3.2. Status Sosial-Profesional: Pengetahuan, Identitas, dan Norma

Penelitian ini juga menemukan bahwa status sosial-profesional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pegawai DJP menunjukkan tingkat kepatuhan tertinggi, diikuti oleh PNS non-DJP, dan mahasiswa sebagai kelompok dengan tingkat kepatuhan terendah. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa identitas kelompok dan norma institusional dapat membentuk perilaku individu, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak (Bobek et al., 2013; Wenzel, 2007). Alm & Torgler (2006) juga menunjukkan bahwa perbedaan budaya dan status sosial dapat memengaruhi tax morale dan perilaku kepatuhan pajak di berbagai negara.

Dalam konteks mahasiswa, tingkat kepatuhan yang rendah dapat dijelaskan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan paparan terhadap sistem perpajakan. Hal ini sejalan dengan temuan OECD (2017) yang menekankan pentingnya edukasi pajak dan pembentukan identitas profesional dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan generasi muda.

4.3.3. Independensi Efek Altruisme dan Status: Implikasi Teoretis

Analisis interaksi antara altruisme dan status menunjukkan tidak adanya efek interaksi yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Artinya, pengaruh altruisme terhadap kepatuhan pajak bersifat konsisten di seluruh kelompok status, dan demikian pula sebaliknya. Temuan ini mendukung argumen Hashimzade et al. (2013) bahwa faktor-faktor perilaku seperti moralitas, norma sosial, dan identitas profesional dapat beroperasi secara independen dalam memengaruhi keputusan kepatuhan pajak.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya pengembangan model kepatuhan pajak yang lebih holistik dan multidisipliner, yang tidak hanya mengintegrasikan aspek ekonomi, tetapi juga psikologi sosial dan institusional. Dengan demikian, pengembangan teori kepatuhan pajak ke depan perlu mengakomodasi kompleksitas interaksi antara faktor individu, kelompok, dan institusi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini secara sistematis menginvestigasi pengaruh faktor nonekonomi, khususnya altruisme dan status sosial-profesional, terhadap perilaku kepatuhan pajak melalui pendekatan eksperimen laboratorium yang melibatkan tiga kelompok partisipan utama: pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pegawai negeri sipil (PNS) non-DJP, dan mahasiswa. Dengan mengadopsi desain faktorial dan analisis statistik inferensial yang komprehensif, penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan mengelaborasi determinan psikologis dan sosial yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur perpajakan Indonesia.

Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa baik altruisme maupun status sosial-profesional merupakan prediktor signifikan kepatuhan pajak. Temuan bahwa individu dengan tingkat altruisme tinggi justru cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori ekonomi perilaku, khususnya melalui validasi efek substitusi antara kontribusi sosial sukarela dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak formal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa motivasi intrinsik untuk berkontribusi kepada masyarakat tidak secara otomatis terinternalisasi dalam perilaku kepatuhan pajak, terutama ketika persepsi terhadap efektivitas dan transparansi penggunaan dana pajak oleh pemerintah masih dipertanyakan. Temuan ini sejalan dengan literatur internasional yang menekankan pentingnya tax morale, persepsi keadilan fiskal, dan kepercayaan terhadap institusi dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak (Frey & Torgler, 2007; Kirchler et al., 2008; Torgler, 2007).

Selain itu, status sosial-profesional terbukti sebagai determinan penting kepatuhan pajak. Pegawai DJP, yang memiliki tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterikatan institusional yang lebih tinggi, menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini menegaskan relevansi teori social identity dalam konteks perpajakan, di mana norma institusional dan identitas profesional berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan (Alm & Torgler, 2006; Kirchler et al., 2008). Sebaliknya, mahasiswa sebagai kelompok dengan pengalaman dan pengetahuan perpajakan yang terbatas, menunjukkan tingkat kepatuhan terendah, sehingga menyoroti urgensi penguatan edukasi dan literasi perpajakan di kalangan generasi muda.

Tidak ditemukan interaksi signifikan antara altruisme dan status, yang mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut beroperasi secara independen dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya pengembangan model kepatuhan pajak yang lebih holistik dan multidisipliner, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, psikologi sosial, dan institusional secara simultan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi otoritas perpajakan di Indonesia. Pertama, kebijakan peningkatan kepatuhan pajak perlu mengadopsi pendekatan berbasis perilaku (behavioural insights), dengan memperhatikan motivasi intrinsik, persepsi keadilan, dan identitas profesional wajib pajak. Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak menjadi krusial untuk membangun kepercayaan dan tax morale, khususnya di kalangan individu yang altruistik. Ketiga, penguatan edukasi perpajakan dan pembentukan norma institusional di kalangan generasi muda dan aparatur negara perlu diintensifkan untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah literatur ekonomi perilaku di bidang perpajakan, tetapi juga memberikan dasar empiris yang kuat bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis bukti di Indonesia.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

6.1. Implikasi Praktis: Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan penting bagi otoritas perpajakan di Indonesia. Pertama, kebijakan peningkatan kepatuhan pajak perlu mengadopsi pendekatan berbasis perilaku, sebagaimana direkomendasikan oleh OECD (2017). Intervensi seperti nudging, framing, dan simplifikasi proses administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela, terutama di kalangan wajib pajak yang memiliki motivasi intrinsik tinggi.

Kedua, untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan individu yang altruistik, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak. Komunikasi yang efektif mengenai dampak positif pajak terhadap pembangunan sosial dapat memperkuat persepsi bahwa pajak adalah instrumen kontribusi sosial yang efektif (Frey & Torgler, 2007; OECD, 2017). Ketiga, program edukasi pajak yang lebih intensif dan tersegmentasi perlu dikembangkan, khususnya untuk kelompok masyarakat yang kurang berpengalaman seperti mahasiswa. Selain itu, pembentukan identitas profesional dan norma institusional di kalangan pegawai pemerintah dapat memperkuat kepatuhan pajak secara internal (Kirchler et al., 2008). Terakhir, upaya untuk meningkatkan tax morale, seperti penghargaan bagi wajib pajak patuh dan kampanye publik tentang pentingnya pajak, dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan (Alm, 2019; Torgler, 2007).

6.2. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Masa Depan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, jumlah partisipan yang relatif terbatas dapat mempengaruhi generalisasi temuan penelitian. Kedua, seluruh peserta eksperimen berasal dari Kementerian Keuangan (mahasiswa reguler dianggap menjadi bagian Kemenkeu karena status PKN STAN) yang memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang perpajakan dibandingkan dengan masyarakat umum sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan perilaku atau sikap masyarakat luas. Ketiga, eksperimen laboratorium meskipun memberikan kontrol yang tinggi, tetap memiliki keterbatasan dalam merepresentasikan kompleksitas situasi nyata di lapangan. Terakhir, pengukuran altruisme dan kepatuhan pajak didasarkan pada perilaku dalam eksperimen, yang meskipun valid secara internal, tetap perlu diuji lebih lanjut dalam konteks dunia nyata.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar dan beragam, serta mengombinasikan metode eksperimen laboratorium dengan survei lapangan untuk meningkatkan validitas eksternal. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor psikologis lain, seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan fiskal, dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap perilaku kepatuhan pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. (2001). For good and evil: the impact of taxes on the course of civilization. In *Madison Books (Second edi)*. <https://doi.org/10.18411/lj-02-2020-89>
- Agresti, A. (2003). *Categorical data analysis (Vol. 482)*. John Wiley & Sons.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alm, J. (2012). Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies. *International Tax and Public Finance*, 19(1), 54–77.
- Alm, J. (2019). What Motivates Tax Compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Alm, J., Bloomquist, K. M., & McKee, M. (2015). On the external validity of laboratory tax compliance experiments. *Economic Inquiry*, 53(2), 1170–1186.
- Alm, J., & Bourdeaux, C. J. (2014). *Applying behavioral economics to the public sector*. Tulane Univ., Department of Economics.
- Alm, James, Bahl, Roy, & Murray, Matthew N. (1990). Tax Structure and Tax Compliance. *The Review of Economics and Statistics*, 72(4), 603-613. <https://doi.org/10.2307/2109600>
- Alm, J., & Martinez-Vazquez, J. (2003). *Institutions, paradigms, and tax evasion in developing and transition countries*.
- Alm, J., & Martinez-Vazquez, J. (2007). *Tax morale and tax evasion in Latin America*. Retrieved from International Studies Program website: <https://www.researchgate.net/publication/46455679>
- Alm, J., & Soled, J. A. (2017). *W (h) ither the Tax Gap*. Wash. L. Rev., 92(2), 521.
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/2565123>

- Bajada, C., & Schneider, F. (2005). The shadow economies of the Asia-Pacific. *Pacific Economic Review*, 10(3), 379–401.
- Bobek, Donna D, Hageman, Amy M, & Kelliher, Charles F. (2013). Analyzing the role of social norms in tax compliance behavior. *Journal of Business Ethics*, 115, 451-468.
- Bobek, Donna, Hageman, Amy, & Hausserman, Cass. (2025). Are Fairness Perceptions Related to Moral Licensing Behavior? Evidence From Tax Compliance. *Journal of Business Ethics*, 198(1), 199-221.
<https://doi.org/10.1007/s10551-024-05784-y>
- Bosco, L., & Mittone, L. (1997). Tax evasion and moral constraints: some experimental evidence. *Kyklos*, 50(3), 297–324.
- Christian, R. C., & Alm, J. (2014). Empathy, sympathy, and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 40, 62–82.
- Costa, P. T., & McCRAE, R. R. (1999). A five-factor theory of personality. *The Five-Factor Model of Personality: Theoretical Perspectives*, 2, 51–87.
- Cullen, Julie Berry. (2013). Taxes in America: What Everyone Needs to Know. *Journal of Economic Literature*, 51(4), 1199-1200. <https://doi.org/10.1257/JEL.51.4.1183.R8>
- DJP. (2025). *Laporan Kinerja DJP Tahun 2024*.
- Dong, Sarah Xue, Satyadini, Agung, & Sinning, Mathias. (2025). Location Matters: Insights from a Natural Field Experiment to Enhance Small Business Tax Compliance in Indonesia.
- e Hassan, Ibn, Naeem, Ahmed, & Gulzar, Sidra. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>
- Eisenberg, N., & Mussen, P. H. (1989). *The roots of prosocial behavior in children*. Cambridge University Press.
- Eisenhauer, J. G. (2006). *The shadow price of morality*. *Eastern Economic Journal*, 32(3), 437–456.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1.
- Fonseca, M., & Myles, G. D. (2012). A survey of experiments on tax compliance. *HM Revenue and Customs Research Report*, 198.
- Friedland, N., Maital, S., & Rutenberg, A. (1978). A simulation study of income tax evasion. *Journal of Public Economics*, 10(1), 107–116.
- Frans, B, M. (2008). Putting the Altruism Back into Altruism: The Evolution of Empath. *Annu Rev. Psychol.* 59:279-300.
- Frey, Bruno S& Torgler, Benno. (2007). Tax morale and conditional cooperation. *Journal of Comparative Economics*, 35(1), 136-159.
- Gangl, K., Torgler, B., Kirchler, E., & Hofmann, E. (2014). Effects of supervision on tax compliance: Evidence from a field experiment in Austria. *Economics Letters*, 123(3), 378–382.
- Gemmell, N., & Hasseldine, J. (2012). *The tax gap: A methodological review. Working Papers in Public Finance*, (September). Retrieved from [http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/2435/Working Paper 09.pdf?sequence=1](http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/2435/Working%20Paper%2009.pdf?sequence=1)
- Gill, D., & Prowse, V. (2012). A structural analysis of disappointment aversion in a real effort competition. *American Economic Review*, 102(1), 469–503.
- Hallsworth, M. (2014). The use of field experiments to increase tax compliance. *Oxford Review of Economic Policy*, 30(4), 658–679.
- Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The behavioralist as tax collector: Using natural field experiments to enhance tax compliance. *Journal of Public Economics*, 148, 14–31.
- Hashimzade, N., Myles, G. D., & Tran-Nam, B. (2013). Applications of behavioural economics to tax evasion. *Journal of Economic Surveys*, 27(5), 941–977. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2012.00733.x>
- Hasty, Connor& Maner, Jon K. (2020). Power, status, and social judgment. *Current Opinion in Psychology*, 33, 1-5. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.06.007>
- Holzinger, L. A., & Biddle, N. (2016). Behavioural insights of tax compliance: An overview of recent conceptual and empirical approaches. *Tax and Transfer Policy Institute-Working Paper*, 8.
- James, S. (2015). Taxation and the contribution of behavioral economics. In *Handbook of Contemporary Behavioral Economics* (pp. 611–623). Routledge.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10036/47458>
- John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. *Handbook of Personality: Theory and Research*, 2(1999), 102–138.
- Kaplanoglou, Georgia& Rapanos, Vassilis T. (2013). Tax and Trust: The Fiscal Crisis in Greece. *South European Society and Politics*, 18(3), 283-304. <https://doi.org/10.1080/13608746.2012.723327>
- Kasper, Matthias. (2016). How do institutional, social, and individual factors shape tax compliance behavior? Evidence from 14 Eastern European countries.
- Kerr, B., Smith, P. G., Feldman, M. W. 2004. What is altruism? *Trends in ecology and evolution*. Vol. 19 (3). (135-140)

- Khwaja, M. S., & Iyer, I. (2014). Revenue Potential, Tax Space, and Tax Gap: A Comparative Analysis. *World Bank Policy Research Working Paper*, (May).
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kirchler, Erich, Kogler, Christoph, & Muehlbacher, Stephan. (2014). Cooperative tax compliance: From deterrence to deference. *Current Directions in Psychological Science*, 23(2), 87-92.
- Levitt, S. D., & List, J. A. (2007). What do laboratory experiments measuring social preferences reveal about the real world? *Journal of Economic Perspectives*, 21(2), 153–174.
- List, J. A., & Metcalfe, R. (2014). Field experiments in the developed world: an introduction. *Oxford Review of Economic Policy*, 30(4), 585–596.
- Mebratu, Agumas Alamirew. (2024). Theoretical foundations of voluntary tax compliance: evidence from a developing country. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1-8.
- Myers, D.G. (2009). *Social Psychology*. New York: McGraw Hill.
- Myles, G. D., & Naylor, R. A. (1996). A model of tax evasion with group conformity and social customs. *European Journal of Political Economy*, 12(1), 49–66.
- Nair, Vedanth& Utama, Mekar Satria. (2023). Taxing high-net-worth individuals: experience from Indonesia. *Fiscal Studies*, 44(3), 243-245. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-5890.12345>
- OECD. (2002). *Measuring the Non-Observed Economy: A Handbook*. In *Measuring the Non-Observed Economy: A Handbook*. <https://doi.org/10.1787/9789264175358-en>
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. *Centre for Tax Policy and Administration*, (October), 1–73. Retrieved from <https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf>
- OECD. (2017). *Use of behavioural insights in consumer policy*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*. In OECD Publishing Paris. Retrieved from http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf%0Ahttps://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2021_ed374457-en
- Ramadhan, Muhammad Rheza, Widiarto, Fajar, Liriyansah, Bismar, Khusaini, Fachrul, & Arifandi, Budi. (2025). Altruism and tax compliance: Unveiling the dual role of charitable giving and social norms in global tax evasion. *Educoretax*, 5(1), 13-20.
- Ramirez-Zamudo, A., Lopez-Perez, R., & Abanto-Aranda, D. (2021). A review of tax deterrence and tax morale. In *the II Annual Congress of Behavioral Economics and Finance*.
- Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67–78.
- Richardson, M., & Sawyer, A. J. (2001). A taxonomy of the tax compliance literature: further findings, problems and prospects. *Austl. Tax F.*, 16, 137.
- Roscoe, J.T. (1975) *Fundamental Research Statistics for the Behavioural Sciences*, 2nd edition. New York: Holt Rinehart & Winston.
- Schwartz, R. D., & Orleans, S. (1967). On legal sanctions. *The University of Chicago Law Review*, 34(2), 274–300.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & sons.
- Service, I. R. (2021). Glossary. Retrieved from <https://apps.irs.gov/app/understandingTaxes%0A/student/glossary.jsp>
- Slemrod, J. (2016). Tax compliance and enforcement: *New research and its policy implications* (No. 1302).
- Slemrod, J., & Weber, C. (2012). Evidence of the invisible: toward a credibility revolution in the empirical analysis of tax evasion and the informal economy. *International Tax and Public Finance*, 19(1), 25–53.
- Smith, J. D. (1985). *Market motives in the informal economy*. In *The economics of the shadow economy* (pp. 161–177). Springer.
- Srinivasan, T. N. (1973). Tax evasion: a model. *Journal of Public Economics*, 2(4), 339–346. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(73\)90024-8](https://doi.org/10.1016/0047-2727(73)90024-8)
- Supriyadi, M. W. (2017). *Beyond deterrence: an empirical and experimental analysis of tax compliance behavior in Indonesia*. (Tese de Doutorado). Retrieved from <https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJTM.2014.064911>
- Syarbin, I, Restiatun, J, & Suratman, E. (2023). Demographic characteristics and tax compliance. *Asian Journal of Social Science Studies*, 8(1), 1.
- Tankard, Margaret E.& Paluck, Elizabeth Levy. (2016). Norm Perception as a Vehicle for Social Change. *Social Issues and Policy Review*, 10(1), 181-211. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/sipr.12022>
- Tanzi, Vito& Zee, Howell H. (2000). Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries. *National Tax Journal*, 53(2), 299-322. <https://doi.org/10.17310/ntj.2000.2.07>
- Torgler, B. (2007). Tax Morale in Central and Eastern European Countries. *Tax Evasion, Trust, and State Capacities*, 155–185.
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005). Tax morale and fiscal policy. CREMA Working Paper.

- Trivedi, V. Umashanker, Shehata, Mohamed, & Lynn, Bernadette. (2003). Impact of Personal and Situational Factors on Taxpayer Compliance: An Experimental Analysis. *Journal of Business Ethics*, 47(3), 175-197. <https://doi.org/10.1023/A:1026294332606>
- Vatavu, Sorana, Lobont, Oana-Ramona, Stefea, Petru, & Brindescu-Olariu, Daniel. (2019). How Taxes Relate to Potential Welfare Gain and Appreciable Economic Growth. *Sustainability*, 11(15), 4094. <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/15/4094>
- Wenzel, M. (2005). Misperceptions of social norms about tax compliance: From theory to intervention. *Journal of Economic Psychology*, 26(6), 862–883.
- Wenzel, M. (2006). A letter from the tax office: Compliance effects of informational and interpersonal justice. *Social Justice Research*, 19(3), 345–364.
- Wenzel, Michael. (2007). The multiplicity of taxpayer identities and their implications for tax ethics. *Law & Policy*, 29(1), 31-50.
- Witte, Ann D, & Woodbury, D. F. (1985). The effect of tax laws and tax administration on tax compliance: The case of the U.S. individual income tax. *National Tax Journal*, 38(1), 1–13.
- Witte, Ann Dryden. (1989). *Taxpayer Compliance*, Volume 1: An Agenda for Research. University of Pennsylvania Press.
- Woods, S. A., & Hampson, S. E. (2005). Measuring the Big Five with single items using a bipolar response scale. *European Journal of Personality: Published for the European Association of Personality Psychology*, 19(5), 373–390.
- Yitzhaki, S. (1974). A note on income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 3(2), 201–202. <https://doi.org/10.1007/bf02298834>